

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Razak. 2012. *Peraturan Kebijakan (Beleidsregel)*. Republik Institute. Yogyakarta.
- Ahmad Redi. 2018. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Gede Marhaendra Wija Atmaja, dkk. 2018. *Hukum Perundang-Undangan*. Uwais Inspirasi Indonesia. Ponorogo.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penelitian Artikel*. Mirra Buana Media. Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2010. *Perihal Undang-Undang*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konpress. Jakarta.
- Maria Farida Indrati S. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan*, PT Kanisius. Depok.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB.
- Muladi. 2002. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi di Indonesia*. Habibie Center. Jakarta.
- M. Yahya Harahap. 2009. *Kekuasaan Mahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Kencana Persada Media Group, Jakarta.

Philipus M. Hadjon, dkk. 2015. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2011, *Argumentasi Hukum*, Gaadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Ridwan HR. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers. Jakarta.

Victor Imanuel W. Nalle. 2017. *Ilmu Perundang-Undangan*. Suluh Media. Yogyakarta.

Yulia. 2015. *Hukum Perdata*. CV. BieNa Edukasi. Aceh.

Yuliandri. 2009. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik*. PT RajaGrafindo. Jakarta.

Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.

### **Artikel Jurnal**

Andi Yulianti. Daya Ikat Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 4. Tahun 2017.

Lutfi Salsabila dan Sigma Febby Annisa. Kajian Hak Asasi Manusia dalam Penerobosan Prinsip Non-Rekroaktif pada Pelaku Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. *Lex Scientia Law Review* Vol. 1, No. 1. Tahun 2017.

Meirina Fajarwati. Validitas Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Legislasi Indonseia*. Vol. 14. Nomor. 2. Tahun 2017.

Muhammad Aslansyah. Studi Sejarah Hans Kelsen tentang *Pure Theory of Law* Ditinjau dari Perspektif Keadilan. *Jurnal Tomalebbi*. Vol. 1, No. 1. Tahun 2014.

Puteri Hikmawati. Kontroversi Surat Edaran Mahkamah Agung Mengenai Pengajuan Peninjauan Kembali Satu Kali. *Info Singkat Hukum*. Vol. VII, No. 1. Tahun 2015.

Sadhu Bagas Suratno. Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. *e-Journal Lentera Hukum*. Vol. 4, No. 3. Tahun 2017.

Syofyan Hadi dan Tomy Michael. Prinsip Keabsahan (*Rechtmatigheid*) dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara. *Jurnal Cita Hukum*. Vol. 5, No. 2. Tahun 2017.

Vica J. E. Saija. Peraturan Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Menurut Jenis Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Sasi*, Vol.20, No. 2. Tahun 2014.

Victor Imanuel W. Nelle. Kewenangan Yudikatif dalam Pengujian Peraturan Kebijakan, *Jurnal Yudisial*, Vol. 6, No. 1. Tahun 2013.

----- . Kedudukan Peraturan Kebijakan dalam Undang-Undang Administrasi Negara. *Refleksi Hukum*, Vol.10, No. 1. Tahun 2016.

Yanis Maladi. Benturan Asas *Nemo Judex Idoneus in Propria Causa* dan Asas *Ius Curia Novit*. Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 2. Tahun 2010.

Yuristyan Pambudi Wicaksana. Implementasi Asas *Ius Curia Novit* Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim tentang Keabsahan Penetapan Tersangka. Jurnal Lex Renaissance, Vol. 3. No. 1. Tahun 2018.

## **Undang-Undang dan Peraturan Sejenis**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Konstitusi Republik Indonesia Serikat

Undang Undang Dasar Sementara Tahun 1950

TAP MPR Nomor XX/MPRS/1966 tentang Momenandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum RI dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia

TAP MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan-Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Peraturan Pemerintah Pusat. Djenis. Bentuk. Peraturan tentang djenis dan bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Permendagri Nomor 55 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peralihan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ke Pengadilan Negeri.

### **Tesis**

Nabella. 2012. *Penerapan Asas Nemo Judex in Causa Sua Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. Tesis. Magister Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

### **Kamus**

Herpinus Simanjuntak. 1997. Kamus (Inggris, Belanda, Indonesia). Kesaint Blanc. Jakarta.

Subrata Kubung. 2014. Kamus Hukum (Internasional & Indonesia). Permata Press.

### **Artikel Internet**

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5da3d5db300a9/kedudukan-sema-terhadap-suatu-undang-undang/>. Diakses pada tanggal 17 Desember 2021 pukul 13:14 WITA.